

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN JEMBER

Medya Putri Jihan Umami¹ Dr. Emy Kholifah R, . M. Si²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari bagian penanganan Program Pendidikan Gratis di Bidang Sekolah Dasar. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pembahasan dari penerapan Program Pendidikan Gratis terdapat beberapa kriteria yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penerapan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember sudah dapat terbilang berjalan dengan baik berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pendidikan Gratis

ABSTRACT

This study aims to determine the Evaluation of Free Education Programs in Jember Regency. The method used in this research is a qualitative approach. Source of data obtained from the handling of the Free Education Program in the Field of Elementary Schools. Data collection through interviews, observation, and documentation. The results of the discussion of the application of the Free Education Program there are several criteria that include effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. The implementation of the Free Education Program in Jember Regency has been able to run quite well based on the technical guidelines that have been determined as a reference in its implementation.

Keywords: Evaluation, Programs, Free Education

I. PENDAHULUAN

Menurut Radja Mudyaharjo (2002:1) menyatakan, bahwa “ Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu”. Pendidikan merupakan elemen penting untuk membangun masyarakat di dalam sebuah negara. Namun di Indonesia, belum semua masyarakat mampu mengakses pendidikan yang terjangkau. Padahal, sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang murah, bahkan gratis di Indonesia sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 bahwa yang berhak untuk diambil oleh setiap warga negara,

tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar, kewajiban negara dalam membiayai pendidikan serta mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Pendidikan tidak diselenggarakan secara tidak sengaja atau seenaknya, fungsi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik. “Menyiapkan” diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan dirinya sendiri. Sekolah sebagai suatu lembaga

pendidikan formal, secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan melakukan berbagai kegiatan belajar. Dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong ke pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun dan ditata dalam suatu kurikulum, yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran. Untuk bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik dan yang memenuhi persyaratan diatas diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat pendidikan itu dapat berjalan dengan baik, salah satunya “pendidikan gratis”.

Sekolah gratis adalah sebuah program pemerintah yang diupayakan untuk menyelesaikan masalah pemerataan akses pendidikan. Kebijakan sekolah gratis ini diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah mahal biaya pendidikan yang banyak dikeluhkan masyarakat terutama dari golongan menengah ke bawah. Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang selama ini ditanggung oleh sekolah dari beberapa sumbangan pendidikan (pungutan liar) dari masyarakat, ini diganti dengan dana BOS. Sekolah gratis bukan sesuatu yang harus diminta masyarakat karena itu sudah menjadi hak. Program Pendidikan Gratis di berbagai daerah di Indonesia, yang telah menerapkan Program Pendidikan Gratis salah satunya di Kabupaten Jember. Dimana masa jabatan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., sudah menerapkan Program Pendidikan Gratis pada tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember Pasal 2 Ayat (2) menyatakan secara khusus program pendidikan gratis bertujuan untuk membebaskan seluruh bentuk pungutan dan sumbangan bagi peserta didik SD/MI/SMP/MTs Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Negeri penerima dana pendidikan gratis terhadap biaya operasional sekolah.

Sasaran program pendidikan gratis dalam Peraturan Bupati Jember No. 65 Tahun 2016 pada Pasal 3 adalah semua

yang menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk

sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kecuali untuk tahun pertama sarannya adalah sekolah negeri di lingkup Dinas Pendidikan kabupaten sedang untuk tahun kedua dan seterusnya hanya pada jenjang pendidikan dasar, baik di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten maupun di lingkup Kementerian Agama. Pada Pasal 8 Ayat (4) dijelaskan bahwa sekolah wajib membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan untuk SMP/MTs/SMA/SMK sedangkan untuk SD/MI dikirim ke UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Kecamatan. Bupati Jember mengharapkan program pendidikan gratis bisa mengurangi kesenjangan pendidikan antar masyarakat kaya dan miskin, serta kesenjangan antara wilayah kota dan desa, meningkatkan angka siswa melanjutkan sekolah, dan menekan angka drop out (DO).

Pendidikan adalah sebuah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pendidikan di Kabupaten Jember harus digratiskan hingga tingkat SMA/SMK dan tidak boleh memberatkan masyarakat. Bupati bahkan sudah menginstruksikan tidak boleh ada pungutan apapun di sekolah negeri hingga tingkat SMA. Meskipun pengeloan lembaga pendidikan SMA/SMK saat ini berada di bawah naungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, namun di Kabupaten Jember program pendidikan gratis tetap bisa direalisasikan. Untuk membantu para siswa agar tidak putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Jember telah menyiapkan dana bagi siswa yang dapat diajukan sebagai bantuan beasiswa. Bupati Faida menyatakan hal tersebut sengaja dilakukan sebagai salah satu upaya pengungkit untuk mempercepat kemajuan pendidikan.

Terkait dengan sasaran dan besaran dana Program Pendidikan Gratis per siswa, sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah semua Sekolah SD - SMP Negeri yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan mempertimbangkan bahwa

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) ditentukan oleh jumlah peserta didik yang ada di lembaga tersebut. Berdasarkan pengelolaan program PPG, bahwa program PPG disalurkan langsung ke SD / SMP Negeri melalui Dinas Pendidikan dan bekerja sama dengan Bank Jatim. Namun terdapat juga lembaga swasta yang tidak mengajukan alokasi dana program pendidikan gratis (PPG) kepada Pemerintah Kabupaten Jember.

Program Pendidikan Gratis ini sebenarnya telah diberikan kepada semua lembaga negeri maupun swasta, bagi lembaga negeri memang sudah dinyatakan wajib untuk menerima PPG, dan bagi lembaga swasta itu tergantung pada lembaga itu sendiri dapat menerima atau tidak. Sebenarnya program pemerintah ini akan menjadi lebih mudah terealisasi jika tanpa adanya pro dan kontra yang terjadi. Kualitas tidak perlu diragukan, dan guru pun dengan suka cita mengajarkan semua hal yang baru kepada anak didik, karena mengajar merupakan tugas utama dari seorang guru untuk anak didiknya. Jika kita masih mempertanyakan mengapa biaya pendidikan harus gratis, maka sebaiknya kita kembali ke tahun 1945 ketika kita memproklamkan diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka yang bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Bagaimana mungkin kita akan dapat mencerdaskan bangsa ini jika untuk mendapatkan pendidikan dasar saja warga negaranya kesulitan karena pendidikan yang dikelola oleh pemerintah mahal harganya. Maka, pendidikan gratis merupakan program untuk meringankan beban orang tua atau wali murid melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah. Dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Program ini juga membebaskan seluruh bentuk pungutan dan sumbangan bagi peserta didik tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan kajian tentang "Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember". Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana evaluasi pada

program pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah di Kabupaten Jember.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas untuk pelaksanaan program pendidikan gratis, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimana Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember?

Tujuan Masalah

Untuk mengetahui Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait dengan Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember. Penelitian ini juga menfokuskan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Lokasi Penelitian

Menurut Moeleong (2000:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember, dan penelitian ini juga menfokuskan pada Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember. Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember sudah berjalan sejak tahun 2016.

Sumber Data

A. Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian.

Data primer diperoleh langsung dari 3 orang informan.

B. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian yaitu dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan keterangan lainnya. Data sekunder diperoleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan pegawai dari bidang Sekolah Dasar terkait dengan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap perilaku penerbitan perijinan serta perilaku masyarakat yang sedang mengurus izin lokasi.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode Penentuan Informan

Apabila kita ketahui Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui mengenai Program Pendidikan Gratis. Seperti halnya yang telah dipaparkan pada data primer tersebut.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi

- penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data.
 3. Penyajian data, serangkaian organisasi informasi yang memungkinkan untuk operasi penelitian. Penyajian data diperoleh oleh berbagai jenis, jaringan, hubungan interaksi, atau tabel.
 4. Menggambar kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti perlu memahami dan menanggapi sesuatu yang telah diselidiki langsung di lapangan dengan mengatur pola arah dan sebab dan akibat.

Keabsahan Data

Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember

Evaluasi secara umum merupakan pengukuran dan perbaikan didalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti halnya membandingkan dari hasil-hasil kegiatan yang telah dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat tersebut dapat berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu dapat terselenggarakan dengan baik. Sehingga dapat diartikan bahwa evaluasi itu adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari sebuah hasil akhir suatu pekerjaan yang telah dinyatakan tercapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Hasil dari

evaluasi yang dimaksudkan adalah untuk perencanaan kembali, dan juga berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar tujuan.

Menurut William N. Dunn, evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu telah berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi juga mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Pada bagian akhir dari suatu proses kebijakan yaitu evaluasi kebijakan.

Terkait dengan sasaran dan besaran dana Program Pendidikan Gratis per siswa, sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah pada semua Sekolah SD-SMP Negeri yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan mempertimbangkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) ditentukan oleh jumlah peserta didik yang ada di lembaga tersebut. Dengan demikian sasaran SD-SMP Negeri dan jumlah alokasi bantuan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Jember. Program Pendidikan Gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, orang tua, wali siswa dengan bentuk kegiatan pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional SD/SMP Negeri yang selama ini ditanggung oleh masyarakat, orang tua, wali siswa.

Berdasarkan pengelolaan Program Pendidikan Gratis (PPG), bahwa Program Pendidikan Gratis (PPG) disalurkan langsung ke SD/SMP Negeri melalui Dinas Pendidikan dan bekerja sama dengan Bank Jatim. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data siswa dan alokasi dana per SD/SMP Negeri di Kabupaten Jember terkait Program Pendidikan Gratis sesuai Dapodik. Dinas Pendidikan Kabupaten selaku pengelola program ini dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang SD dan PPTK bidang SMP, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Pendidikan Gratis. Pada tingkat SD/SMP Negeri pengelolaan program ini dilakukan oleh tim manajemen yang dibentuk oleh kepala sekolah.

Efektivitas. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas disebut juga hasil guna. Dalam segi efektivitas dari penerapan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember ini dapat dikatakan sudah benar efektif. Namun, masih terdapat lembaga yang menolak dengan adanya Program Pendidikan Gratis tersebut. pada dasarnya Pendidikan Gratis itu diberikan untuk semua lembaga negeri maupun swasta, tetapi yang wajib menerima PPG ini adalah lembaga negeri. Sedangkan untuk lembaga swasta itu tergantung dari yayasannya untuk menerima tidaknya Program Pendidikan Gratis, tetapi juga tidak semua lembaga swasta menolak program ini, terdapat juga yang menerima dan tidak bersedia menerima. Bagi yang menolak adanya PPG ini, maka lembaga tersebut harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa lembaga tersebut menolak atau tidak menerima adanya Program Pendidikan Gratis. Awalnya lembaga SD negeri itu terdapat 910 lembaga yang sekarang menjadi 908 lembaga, jadi terdapat dua lembaga yang dinyatakan tutup karena kekurangan murid. Pada intinya bahwa Program Pendidikan Gratis itu membantu dana yang dikeluarkan oleh Pemkab, dan

Program Pendidikan Gratis itu sendiri merupakan salah satu program dari 22 janji Bupati Faida dimasa jabatannya.

Efisiensi. Efisiensi dapat diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. efisiensi dari Program Pendidikan Gratis ini pertama yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi, tiap lembaga dapat mengirimkan usulan untuk per triwulan yang dapat dicairkan kemudian merekapnya dan proses pencairannya pada setiap per triwulan itu dapat dicairkan. Lembaga mengirimkan rencana kerja hasil untuk pembelanjaan pada per triwulannya yang isinya berupa pengusulan nominal jumlah per triwulan setelah itu baru dapat dicairkan ke Bank Jatim. Bagi lembaga yang sudah menerima Program Pendidikan Gratis sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menarik kembali kepada orang tua murid, karena segala kegiatan di tiap lembaga tersebut sudah disediakan berupa BOS dari Program Pendidikan Gratis pusat ataupun daerah.

Kecukupan. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan juga masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan suatu kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Proses pencairan dana untuk bidang SD sendiri sudah dapat dikatakan 97% terlaksana, namun untuk permasalahan yang sering terjadi pada proses pencairan terletak pada guru tidak tetap yang masih membutuhkan verifikasi ulang dalam pencairannya, jadi dana Program Pendidikan Gratis tersebut belum bisa dikatakan maksimal 100% terlaksana. Sedangkan guru tidak tetap yang telah memiliki surat perintah, maka pasti mendapatkan dana dari Program Pendidikan Gratis, dan terkadang jika BOS tidak cukup untuk menggaji maka bisa mendapatkan atau dibantu dengan Program Pendidikan Gratis.

Perataan. Perataan dalam kebijakan publik mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh sasaran

dari kebijakan tersebut. Artinya, pelaksanaan dari suatu kebijakan itu haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil dari kebijakan tersebut. dalam proses pendistribusian Program Pendidikan Gratis (PPG) ini sudah diberikan secara merata. Namun, dikatakan merata itu bukan berarti diberikan secara sama besar kepada tiap siswa, dalam arti acuannya tergantung pada besarnya jumlah siswa. Jadi, semakin sedikit siswanya maka akan semakin sedikit pula pendapatannya dan apabila jumlah siswanya banyak maka pendapatan yang didapatkan juga besar. Pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 240.000,- itu per tahun dan per siswa. Jika lembaganya kecil atau lebih sedikit misalkan dikatakan terdapat 100 anak, maka pendapatan yang dihasilkan mendapatkan sebesar 24jt. Jika lembaganya besar, maka yang dihasilkan juga besar.

Responsivitas. Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok - kelompok masyarakat tertentu. Dinas Pendidikan sendiri menilai respon pencapaiannya sudah dianggap sesuai dengan target. Tetapi, Pak Rengga mengatakan bahwa sebenarnya untuk masalah ini yang dapat menjawab hasil dari adanya Program Pendidikan Gratis itu sendiri adalah lembaga terkait. Pada bulan Desember 2019 awal lalu Dinas Pendidikan sudah mencairkan untuk triwulan yang keempat, lembaga juga masih harus membelanjakan dana tersebut, dan bagi yang jumlah siswanya banyak maka dapat dianggap bahwa sudah terbilang memuaskan dalam membantu pengeluaran lembaga, dan jika untuk jumlah siswa yang sedikit maka hal tersebut dapat diketahui oleh lembaganya itu sendiri.

Ketepatan. Ketepatan disini berarti kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu tindakan kepada

suatu kegiatan yang menjadi tujuan dari kegiatan itu sendiri. Ketepatan tujuan yang dimaksud dalam penerapan Program Pendidikan Gratis ini sudah terbilang bahwa Pendidikan Gratis sudah mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. penerapan Program Pendidikan Gratis ini sudah terlaksanakan semua, sehingga sudah tidak ada lagi adanya penarikan yang ditujukan kepada orang tua murid. Terdapat lembaga yang menolak dengan diberikannya Program Pendidikan Gratis ini, dan bagi lembaga yang menolak atau tidak bersedia menerima khususnya pada lembaga swasta dikarenakan lembaga swasta yang menolak tersebut memiliki jumlah siswa yang sedikit. Bisa juga lembaga dengan jumlah siswa yang sedikit ingin menerima program ini, tetapi untuk lembaga swasta yang besar diperbolehkan menarik ke orang tua murid, dan jika dianggap tidak bersedia menerima Program Pendidikan Gratis maka pengeluaran juga akan kurang. Contohnya pada salah satu lembaga swasta di Kabupaten Jember yaitu Al-Furqon, Al-Furqon tergolong sekolah yang biaya operasionalnya cukup mahal, untuk belanja pegawainya juga besar. Sebagai perumpamaan, dengan adanya dana sebesar Rp. 20.000,- per siswa mungkin tidak mencukupi untuk belanja itu. Jadi, jika dilihat dari surat pernyataan yang dibuat oleh kepala sekolah yang diajukan bahwa lembaga menolak adanya Program Pendidikan Gratis, dan tidak ada alasan lain yang menyatakan penolakan tersebut, dan itu hanya berasal dari lembaga swasta saja, untuk lembaga negeri memang sudah diwajibkan untuk menerima Program Pendidikan Gratis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa penerapan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik melalui prosedur-prosedur langkah dalam penerapannya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat. Meskipun didalam penerapan tersebut tentunya juga masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, namun pastinya hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan dengan cara yang semestinya. Berdasarkan teori menurut William N.

Dunn terdapat beberapa kriteria didalam evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan penerapan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember, yaitu diantaranya:

1. Efektivitas, berdasarkan dari segi efektivitasnya dari penerapan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember ini dapat dikatakan sudah benar efektif. Meskipun masih terdapat lembaga yang menolak dengan adanya Program Pendidikan Gratis tersebut yang dikarenakan memang pada lembaga tersebut tidak bersedia menerima, dan yang wajib menerima adalah lembaga negeri, sedangkan lembaga swasta tergantung pada yayasanya masing-masing bersedia menerima atau tidaknya.
2. Efisiensi, berdasarkan dari segi efisiensinya sudah dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan tugasnya, karena pada penerapan Program Pendidikan Gratis ini telah melalui beberapa proses yang sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
3. Kecukupan, berdasarkan dari segi kecukupan sudah terbilang 97% terlaksana karena pada dasarnya untuk permasalahan yang sering terjadi terletak pada guru tidak tetap yang masih membutuhkan verifikasi ulang dalam pencairannya, beda dengan guru tidak tetap yang telah memiliki surat perintah maka sudah pasti akan mendapatkan dana dari Program Pendidikan Gratis.
4. Perataan, berdasarkan dari segi perataan Program Pendidikan Gratis sudah diberikan secara merata. Merata itu dalam arti acuannya tergantung pada besar atau kecilnya jumlah siswa.
5. Responsivitas, dapat dikatakan bahwa dari Dinas Pendidikan sendiri menilai respon pencapaiannya sudah dianggap sesuai dengan target. Tapi tetap yang dapat menjawab hasil dari adanya Program Pendidikan Gratis itu sendiri adalah lembaga terkait, dan pada dasarnya memang masyarakat sangat memberikan respon yang baik dengan adanya Program Pendidikan Gratis karena sesungguhnya mereka dapat terbantu dengan Program tersebut.

6. Ketepatan, berdasarkan penerapan Program Pendidikan Gratis ini sudah terbilang bahwa Pendidikan Gratis sudah mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Dinas Pendidikan sangat memungkinkan dalam membantu proses pencairan dari Program Pendidikan Gratis tersebut untuk demi kesejahteraan rakyat dan juga para peserta didik.

Saran

Saran peneliti kepada pemerintah terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk lebih diprioritaskan kembali dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratis, terutama untuk masyarakat golongan menengah kebawah agar mereka yang tidak mampu bisa juga merasakan senangnya mencari ilmu sebagai seorang pelajar yang sesungguhnya sudah menjadi hak mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arthur G. Gedeian dkk. 1991. Organization Theory and Design. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Aqodiah, 2017. Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis (Studi Komparasi Di SD Dan MI Di Yogyakarta). Ibtida'iy Jurnal|PGMI
- Danim, Sudarwan. 2000. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Desy Eka Citra, 2017. Implementasi Program Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Bengkulu.

- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Pres.
- J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm.
- Krech, David and Egerton L. Ballanchey. 1962. Individual in Society, A text Book of Social Psychology. Tokyo: Mc Grawhill Kogo Fusha.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang : Averroes Press.
- Muhammad Fachrizal Abubakar, 2015. Implementasi kebijakan pendidikan gratis tingkat pendidikan dasar dan menengah di kabupaten bulungan provinsi Kalimantan utara (studi kasus di sma negeri 1 Tanjung Selor). eJournal Administrative Reform.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu, Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1989)
- Rika A. Diastuti, 2017. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di SMP Negeri 2 Kartasura.
- Steers Richard. M.. 2005. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2005